

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa data untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya administratif pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan daerah diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Upah rata-rata pegawai negeri sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya administratif pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan upah rata-rata pegawai negeri sipil akan meningkatkan biaya administratif pemerintah daerah.
- 2) Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya administratif pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah akan meningkatkan biaya administratif pemerintah daerah.
- 3) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya administratif pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan biaya administratif pemerintah daerah.
- 4) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya administratif pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kecilnya pengaruh pemerintah daerah di dalam perekonomian daerah.
- 5) Transfer dana per kapita dari pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan inefisiensi biaya administrative pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa kenaikan DAU per kapita akan menyebabkan kenaikan inefisiensi biaya administrative oleh pemerintah daerah
- 6) Variabel boneka untuk membedakan antara daerah yang mengalami pemekaran dengan daerah yang tidak mengalami pemekaran berhubungan negative dan tidak signifikan terhadap inefisiensi biaya administrative pemerintah daerah. Hal ini paling mungkin disebabkan kecilnya jumlah

daerah yang mengalami pemekaran relative terhadap daerah yang tidak mengalami pemekaran di dalam sample.

5.2 Saran

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa transfer dana dari pusat kepada daerah akan cenderung menyebabkan pemerintah daerah menjadi kurang efisien dalam mengelola biaya administratifnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh anggapan pemerintah daerah bahwa transfer dana dari pusat merupakan “free good” ataupun grants.

Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Faktor lainnya adalah munculnya persaingan pengeluaran antardaerah. Kecenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal.

Oleh karena itu, kebijakan transfer perlu dikaji kembali untuk mencari format pendistribusian transfer yang lebih baik. Formula alokasi transfer seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah melainkan perlu mengacu pula pada realisasi pengumpulan PAD guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dari sisi internal pemerintah daerah, temuan tersebut menyiratkan pentingnya penetapan standard pelayanan minimum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga akan membawa peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.